



RENSTRA 2023-2026

Rencana Strategis
Perangkat Daerah



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

<http://perindag.babelprov.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya jualah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 ini dapat disusun dengan baik.

Penyusunan Renstra PD merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan membuat rencana strategis sebagai pedoman kerja setiap perangkat kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan alur konsistensi dari Dokumen RPD tahun 2023-2026 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah serta menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian, Renstra PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 ini dapat dipedomani, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

Pangkalpinang, Maret 2022



DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
B A B I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
B A B II.....	8
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
Gambar 2.1.....	10
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	10
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	10
2.2. Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	11
Tabel 2.2.1. Jumlah ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 Berdasarkan Kelompok Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	11
Tabel 2.2.2. Jumlah ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Tanggal 31 Desember 2021.....	11
Tabel 2.2.3. Jumlah ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Golongan Per Tanggal 31 Desember 2021	11
2.2.1. Kondisi Sarana dan Prasarana.....	12
Tabel 2.2.1.1. Rekapitulasi Buku Inventaris Milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020.....	12
2.3. Kinerja Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan.....	13
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	14
Tabel 2.3.2 Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	16
Tabel 2.3.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	35
Tabel 2.3.4 Anggaran Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	36
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan	48

B A B III	51
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	51
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan	51
A. Urusan Perdagangan	51
B. Urusan Perindustrian	54
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	55
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ...	57
3.3.1. Renstra Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020 – 2024	57
3.3.2. Renstra Kementerian Perdagangan RI Tahun 2020 – 2024	58
3.4. Penentuan Isu Strategis	60
BAB IV	62
TUJUAN DAN SASARAN	62
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	62
Tabel 4.1.1 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	63
Tabel 4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	64
4.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD	65
Tabel 4.2.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dengan Tujuan dan Sasaran RPD	65
Tabel 4.2.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD menyesuaikan PMDN90 dan KMDN050-3078	65
BAB V	67
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	67
5.1. Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan	67
Tabel 5.1.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	68
Tabel 5.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan menyesuaikan PMDN90 dan KMDN050-3078 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	69
BAB VI	71
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	71
6.1. Rencana Program Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran	71
Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	75
Tabel 6.2 Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	95

BAB VII.....	116
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	116
7.1. Tujuan sasaran strategi dan arah kebijakan.....	116
Tabel 7.1.1 Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026	117
BAB VIII.....	118
PENUTUP.....	118
Lampiran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renstra.....	119

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, diinstruksikan kepada Gubernur untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2023-2026.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 dilakukan bersamaan dengan Penyusunan Renstra PD Provinsi Tahun 2023-2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Provinsi Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 dan norma, standar, prosedur dan criteria yang ditetapkan pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah. Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan Renstra PD Provinsi agar memperhatikan:

1. Penyelarasan Program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024.
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan Tahun 2021.
3. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (outcome).
4. Isu-isu strategis yang berkaitan dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah.
5. Kebijakan nasional.
6. Regulasi yang berlaku.

7. Saran dan atau masukan dari pemangku kepentingan (Stakeholders) pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 disusun menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan Renstra PD ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 sampai tahun 2026 kedepan 2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- r. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034);
- s. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
- t. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
- u. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 5 Seri D).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyusunan Renja PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

Adapun tujuan disusunnya Renstra PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan sasaran dan indikator Perangkat Daerah untuk pencapaian Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026;
- b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara umum bahwa Renstra PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam

pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

3. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.3 Penentuan Isu Strategis

4. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPD

5. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

5.2. Arah Kebijakan

6. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

7. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

8. BAB VIII PENUTUP

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan OPD dalam konteks penyusunan Rencana Strategis diperlukan didalam menjabarkan tujuan, fungsi dan struktur organisasi yang dalam hal ini adalah terkait dengan kelembagaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terkait dengan kondisi kepegawaian, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki, kinerja pelayanan yang dilaksanakan tentunya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta tantangan dan peluang didalam usaha untuk mengembangkan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.1. Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Adapun Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaran kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kepala UPTD, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, 4 (empat) orang Kepala Seksi dan 14 (empat belas) orang Subkoordinator.

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

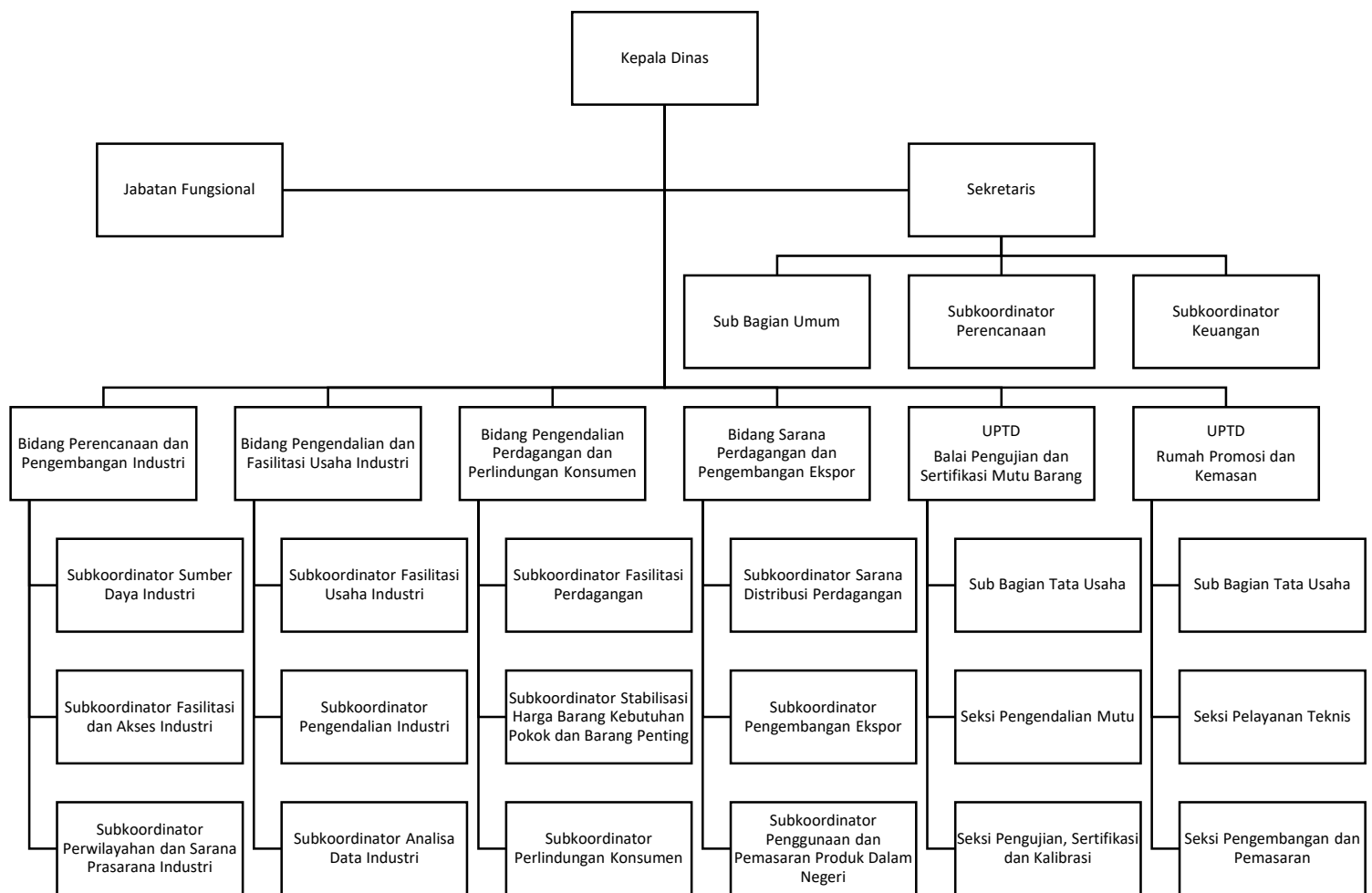
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - Sub Bagian Umum
 - Subkoordinator Perencanaan
 - Subkoordinator Keuangan
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri
 - Subkoordinator Sumber Daya Industri
 - Subkoordinator Fasilitas dan Akses Industri
 - Subkoordinator Perwilayahan dan Sarana Prasarana Industri
- d. Bidang Pengendalian dan Fasilitas Usaha Industri
 - Subkoordinator Fasilitas Usaha Industri
 - Subkoordinator Pengendalian Industri
 - Subkoordinator Analisa Data Industri
- e. Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen
 - Subkoordinator Fasilitas Perdagangan
 - Subkoordinator Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - Subkoordinator Perlindungan Konsumen
- f. Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor
 - Subkoordinator Sarana Distribusi Perdagangan
 - Subkoordinator Pengembangan Ekspor
 - Subkoordinator Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Pengendalian Mutu
 - Seksi Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Promosi dan Kemasan
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Pelayanan Teknis
 - Seksi Pengembangan dan Pemasaran

i. Kelompok Jabatan Fungsional Dinas dan UPTD

- Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
- Penguji Mutu Barang

Terlampir bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



2.2. Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sumber daya manusia yang dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori sebagaimana dijelaskan pada tabel-tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 2.2.1. Jumlah ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 Berdasarkan Kelompok Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin

NO	OPD	JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIN		JABATAN			KET
			L	P	STRUKTURAL	JFU	JFT	
1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	74 Orang	45	29	21	41	12	1 TUBEL
2	UPTD BPSMB	18 Orang	8	10	4	8	6	
3	UPTD RPK	10 Orang	6	4	4	6	0	

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

Tabel 2.2.2. Jumlah ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Tanggal 31 Desember 2021

NO	OPD	PENDIDIKAN									
		S-3	S-2	S-1	D-4	D-3	D-2	D-1	SLTA / Sederajat	SLTP	SD
1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	10	45	2	11	0	0	6	0	0
2	UPTD BPSMB	0	2	8	0	5	0	0	3	0	0
3	UPTD RPK	0	1	6	0	1	0	0	2	0	0

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

Tabel 2.2.3. Jumlah ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Golongan Per Tanggal 31 Desember 2021

NO	OPD	GOLONGAN												
		IV/e	IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a
1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	1	0	4	3	21	15	11	13	5	1	0	0
2	UPTD BPSMB	0	0	0	0	2	1	2	5	4	1	2	0	1
3	UPTD RPK	0	0	0	0	1	0	4	2	0	2	1	0	0

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

2.2.1. Kondisi Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.1.1. Rekapitulasi Buku Inventaris Milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020

No.	Bidang Barang	NERACA (Per 31 Des.2020)	BUKU INVENTARIS (Per 31 Des.2020)	Selisih
I	POSISI BMD DALAM NERACA (A + B + C)	Rp 9.684.868.548,12	Rp 9.684.868.548,12	Rp -
A	ASET LANCAR	Rp 108.749.654,80	Rp 108.749.654,80	Rp -
A.1	Persediaan	Rp 108.749.654,80	Rp 108.749.654,80	Rp -
B	ASET TETAP (B.1+.....+ B.6 - B.7)	Rp 9.278.565.893,32	Rp 9.278.565.893,32	Rp -
B.1	Tanah	Rp 123.373.746,00	Rp 123.373.746,00	Rp -
B.2	Peralatan & Mesin	Rp 14.123.291.635,50	Rp 14.123.291.635,50	Rp -
2,1	ASET LANCAR	Rp 210.020.000,00	Rp 210.020.000,00	Rp -
2,2	Persediaan	Rp 1.007.064.500,00	Rp 1.007.064.500,00	Rp -
2,3	ASET TETAP	Rp 1.189.379.430,00	Rp 1.189.379.430,00	Rp -
2,4	Tanah	Rp 191.461.500,00	Rp 191.461.500,00	Rp -
2,5	Peralatan & Mesin	Rp 1.710.272.988,00	Rp 1.710.272.988,00	Rp -
2,6	Alat Besar	Rp 621.560.300,00	Rp 621.560.300,00	Rp -
2,7	Alat Angkutan	Rp 17.223.800,00	Rp 17.223.800,00	Rp -
2,8	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 8.105.526.492,50	Rp 8.105.526.492,50	Rp -
2,9	Alat Pertanian	Rp -	Rp -	Rp -
2,1	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 1.070.782.625,00	Rp 1.070.782.625,00	Rp -
2,11	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp -	Rp -	Rp -
2,12	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp -	Rp -	Rp -
2,13	Alat Laboratorium	Rp -	Rp -	Rp -
2,14	Alat Persenjataan	Rp -	Rp -	Rp -
2,15	Komputer	Rp -	Rp -	Rp -
2,16	Alat Eksplorasi	Rp -	Rp -	Rp -
2,17	Alat Pengeboran	Rp -	Rp -	Rp -
2,18	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Rp -	Rp -	Rp -
2,19	Alat Bantu Eksplorasi	Rp -	Rp -	Rp -
B.3	Gedung dan Bangunan	Rp 3.942.320.812,82	Rp 3.942.320.812,82	Rp -
3,1	Alat Peraga	Rp 3.942.320.812,82	Rp 3.942.320.812,82	Rp -
3,2	Peralatan Proses/Produksi	Rp -	Rp -	Rp -
3,3	Rambu-Rambu	Rp -	Rp -	Rp -
3,4	Peralatan Olah Raga	Rp -	Rp -	Rp -
B.4	Jalan, Irigasi & Jaringan	Rp 166.400.000,00	Rp 166.400.000,00	Rp -

4,1	Bangunan Gedung	Rp -	Rp -	Rp -
4,2	Monumen	Rp -	Rp -	Rp -
4,3	Bangunan Menara	Rp 166.400.000,00	Rp 166.400.000,00	Rp -
4,4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp -	Rp -	Rp -
B.5	Asset Tetap Lainnya	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00	Rp -
5,1	Jalan dan Jembatan	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00	Rp -
5,2	Bangunan Air	Rp -	Rp -	Rp -
5,3	Instalasi	Rp -	Rp -	Rp -
5,4	Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -
5,5	Asset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
5,6	Buku Perpustakaan	Rp -	Rp -	Rp -
5,7	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Rp -	Rp -	Rp -
B.6	Konstruksi dlm pengerjaan	Rp -	Rp -	Rp -
B.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp 9.077.270.301,00	Rp 9.077.270.301,00	Rp -
C	ASET LAINNYA (C.1 + C.3) - (C.2 + C.4)	Rp 297.553.000,00	Rp 297.553.000,00	Rp -
C.1	Aset Tak Berwujud	Rp -	Rp -	Rp -
C.2	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp -	Rp -	Rp -
C.3	Aset Lain-lain	Rp 297.553.000,00	Rp 297.553.000,00	Rp -
C.4	Akumulasi Penyusutan aset lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -
II	BMD NON NERACA	Rp 430.448.757,50	Rp 430.448.757,50	Rp -
A	BMD EKSTRAKOMPTABEL	Rp 430.448.757,50	Rp 430.448.757,50	Rp -
	TOTAL (I + II)	10.115.317.305,62	10.115.317.305,62	Rp -

2.3. Kinerja Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan

Kinerja pelayanan ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan sasaran / target renstra Dinas Perhubungan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan /atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan capaian indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama 5 tahun (mulai dari tahun 2017 sampai dengantahun 2020). Adapun penyajian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Indikator	SPM/ Standar	IKK	TargetRenstraPerangkat Daerah					RealisasiCapaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	INDIKATOR KINERJA UTAMA												
1	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan						14,250	14,500	14,170	17,925	14,500	15,250	
2	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan						11,500	11,750	11,583	12,666	11,750	12,250	
3	Nilai RB Perangkat Daerah						-	-	-	-	65	67	
	INDIKATOR KINERJA KUNCI												
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
1	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok						9,20	9,00	9,74	2,25	9,00	5,90	
2	Tertib Usaha						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Pertumbuhan nilai ekspor non migas						6,00	7,50	-8,70	106,95	7,50	4,00	
4	Inflasi Pangan Bergejolak						-	-	-	-	-	-	
5	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan						78,00	100,00	59,00	78,00	100,00	83,00	
6	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku						70,00	75,00	96,52	87,94	75,00	85,00	
7	Persentase kinerja realisasi pupuk						99,65	99,70	99,65	99,65	99,70	90,00	
8	Persentase penanganan pengaduan konsumen						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	Pertumbuhan implementasi PLK (Pasar Lelang Komoditas)						-	-	-	-	-	10,00	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas						1,00	2,00	-5,64	5,44	2,00	2,50	
2	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas						62200	63500	58551	53181	63500	57000	
3	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB						19,00	20,00	18,76	20,86	20,00	21,00	
4	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)						1100	1200	1188	2672	1200	1300	
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non-Migas (Rp. Triliun)						4,857	5,462	4,253	4,938	5,462	5,250	

Tabel 2.3.2 Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2023	2024	2025	2026	
				Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Industri	1%	2,5%	2,5%	2,75%	2,75%	2,75%
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Sebaran Wilayah Industri		1	1	1	1	4
	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		15	15	15	15	60
		Jumlah Tenaga Kerja Industri Pengolahan		51000	51500	52000	52500	52500
		Jumlah Sumberdaya Industri yang dibina		4	4	4	4	16
		Jumlah Pelaku Industri terbina dengan kategori baik		24	24	24	24	96
	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		8	8	8	8	32
		Jumlah Sarana Prasarana Kawasan Industri		1	1	1	1	4
	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		8	8	8	8	32

		Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)		5,2 T	5,4 T	5,6 T	5,8 T	5,8 T
	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		6	6	6	6	24
		Jumlah dokumen perencanaan dan laporan penerapan dan evaluasi RPIP		2	2	2	2	8
	Subkegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		12	12	12	12	48
		Tersusunnya Risalah Naskah Penelitian Pertumbuhan Industri		2	2	2	2	8
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (RPK)	Persentase Fasilitasi Layanan Desain dan Kemasan Produk UMKM yang diproduksi (UPTD RPK)	70%	60%	60%	70%	70%	70%
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitas Design dan produksi produk label/kemasan		12	12	12	12	48
		Jumlah Laporan pengelolaan bahan baku, gudang, mesin dan peralatan		12	12	12	12	48
	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		150	165	182	200	697
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Perusahaan Industri dan Kawasan Industri	60%	60%	65%	70%	75%	75%
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang diterbitkan		1	1	1	1	4

		Jumlah Dokumen Berita Acara Verifikasi Teknis Perusahaan Industri dan Kawasan Industri		15	20	25	30	90
		Jumlah Dokumen Berita Acara Verifikasi Teknis Izin Perluasan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri		5	7	9	15	36
	Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: Industri Besar; dan Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi		20	27	34	45	126
		Persentase Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan Industri dan Kawasan Industri	50%	50%	55%	60%	65%	65%
		Jumlah Laporan Perusahaan Industri yang Diawasi		1	1	1	1	4
		Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang diawasi		50	60	65	70	245
		Jumlah Peserta Rakor Wasdal		80	80	80	80	320
		Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Bidang Perindustrian		80	80	80	80	320
		Jumlah Peserta Rakor Industri Hijau		50	50	50	50	200
		Jumlah Peserta Rakor Pengawasan Kawasan Industri		50	50	50	50	200
		Jumlah Peserta Rakor Pengembangan Hilirisasi Industri		80	80	80	80	320

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi		2	2	2	2	8
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri pada Akun SIINas	70%	80%	85%	90%	95%	95%
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Laporan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		1	1	1	1	4
		Jumlah Peserta Bimtek		60	75	80	90	305
	Subkegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		2	2	2	2	8
		Jumlah Peserta Diseminasi		50	60	75	85	270
		Jumlah Dokumen Publikasi Data SIINas		2	2	2	2	8
	Subkegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas		2	2	2	2	8
		Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang dipantau dan dievaluasi		50	55	60	65	230
	Subkegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas		2	2	2	2	8
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Tertib Usaha	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki perizinan		2	4	4	4	14
Subkegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1	1	1	1	4
Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha perdagangan B2 yang memiliki perizinan Perdagangan B2		2	4	4	4	14
Subkegiatan Fasilitas Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1	1	1	1	4
Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah Pelaku Usaha yang memenuhi komitmen/rekomendasi		2	4	4	4	14
Subkegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission		2	2	2	2	8
Subkegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya		2	2	2	2	8
Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase SKA dan Pelaku Ekspor yang terpantau		100%	100%	100%	100%	100%

	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal		12	12	12	12	48
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase Barang terdistribusi	12%	82%	84%	86%	88%	88%
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Persentase sarana distribusi yang terkelola		47%	50%	52%	55%	55%
	Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		1	1	1	1	4
	Subkegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		26	28	30	32	116
	Subkegiatan Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi		4	4	4	4	16
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	9,20%	8,50%	8,30%	8,20%	8,00%	8,00%
	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan Penting		75%	75%	77%	77%	77%
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		12	12	12	12	48
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		12	12	12	12	48

Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok		75%	75%	77%	77%	77%
Subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		12	12	12	12	48
Subkegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		12	14	14	14	54
Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase kinerja realisasi pupuk		90%	90%	90%	90%	90%
Subkegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi		6	8	10	12	36
Subkegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		6	8	10	12	36
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen	40	42	43	43	44	44
Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan konsumen		100%	100%	100%	100%	100%
Subkegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif		1	1	1	1	4
Subkegiatan Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif		2	2	2	2	8

	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani		41	42	43	43	169
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		83%	88%	93%	100%	100%
	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi		12	12	12	12	48
	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani		12	12	12	12	48
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (BPSMB)	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (UPTD BPSMB)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penambahan dan pemeliharaan Ruang lingkup (UPTD BPSMB)		1	1	1	1	1
		Jumlah Laporan Pemeliharaan Ruang Lingkup		12	12	12	12	48
		Jumlah Laporan Pemeliharaan Parameter Pengujian		12	12	12	12	48
		Jumlah Laporan Penambahan Parameter Pengujian		12	12	12	12	48
	Subkegiatan Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau		1	1	1	1	1
		Persentase sampel yang diuji sesuai ketentuan yang berlaku		85%	87%	89%	90%	90%
		Jumlah sampel Lada yang diuji		200	220	240	260	920
		Jumlah sampel CPO yang diuji		30	40	50	60	180
		Jumlah sampel Pengujian Beras		45	60	75	90	270
	Subkegiatan Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang		275	320	365	410	1370
		Persentase sampel yang diuji sesuai ketentuan yang berlaku		100%	100%	100%	100%	100%

	Subkegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan		1	1	1	1	4
		Persentase jumlah alat yang dikalibrasi		80%	80%	90%	90%	90%
	Subkegiatan Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan		5	10	20	20	55
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan nilai ekspor	6%	4%	4,5%	5%	6%	6%
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Komoditi/Produk Yang dipromosikan		2	3	4	5	14
	Subkegiatan Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		4	5	6	7	22
	Subkegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan		2	3	4	5	14
	Subkegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi		3	4	5	6	18
		Jumlah Laporan Nilai Ekspor		12	12	12	12	48
	Subkegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina		25	30	35	40	130
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk Lokal yang digunakan, dipromosikan dan dipasarkan melalui Akses Pasar	12%	60%	65%	70%	75%	75%
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah produk lokal yang dipromosikan		10	12	14	16	52
	Subkegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Promosi Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri		10	12	14	16	52
	Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk lokal yang dipasarkan		10	12	14	16	52

	Subkegiatan Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi		10	12	14	16	52
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk Lokal yang digunakan		10	12	14	16	52
	Subkegiatan Fasilitas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer		10	12	14	16	52
		Jumlah Pemahaman Generasi Muda dalam Penggunaan Produk Dalam Negeri		25	30	35	40	130
	Subkegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri		25	30	35	40	130
		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan akses pasar online		10	12	14	16	52
	Subkegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Jaringan Informasi Perdagangan		10	12	14	16	52
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI (RPK)	Persentase Fasilitas Produk UMKM yang dipasarkan (UPTD RPK)	70%	40%	40%	50%	50%	50%
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang terfasilitasi desain promosi dan atau media promosi		25	30	35	40	130
	Subkegiatan Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri		25	30	35	40	130
	Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang terfasilitasi pemasaran		25	28	31	34	118

	Subkegiatan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi		25	28	31	34	118
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pengembangan kelembagaan (UPTD. Rumah Promosi dan Kemasan)		1	1	1	1	4
	Subkegiatan Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer		1	1	1	1	4
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Disperindag)	80	80	80	80	80	80
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		17	17	18	17	69
	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10	10	11	10	41
	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7	7	7	7	28
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Disperindag)	80	60	60	60	60	60
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan		60	60	60	60	60
		Jumlah Dokumen SPM		26	26	26	26	104
		Jumlah Dokumen SPP		26	26	26	26	104
		Jumlah Dokumen Rekapitulasi Daftar Gaji dan Tunjangan		26	26	26	26	104
		Jumlah Dokumen Kelengkapan Gaji		26	26	26	26	104
	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2800	2800	2800	2800	11200
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1700	1800	1800	1800	7100

		Jumlah Dokumen pengujian/verifikasi		1350	1400	1400	1400	5550
		Jumlah Dokumen Penatausahaan pengeluaran		1350	1400	1400	1400	5550
	Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1700	1800	1800	1800	7100
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		4	4	4	4	16
	Subkegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		4	4	4	4	16
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		38	38	38	38	152
	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		38	38	38	38	152
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang teradministrasi sesuai dengan Peraturan		31	31	31	31	31
	Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		3	3	3	3	12
	Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		22	22	22	22	88
	Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2	2	2	2	8
	Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2	2	2	2	8
	Subkegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		2	2	2	2	8
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		60	60	60	60	60

	Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		22	23	23	23	91
	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1	1	1	1	4
	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10	10	10	10	40
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		60	60	60	60	60
	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4	4	4	4	16
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4	4	16
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4	4	4	4	16
	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4	4	4	4	16
	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4	4	4	4	16
	Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1	1	1	1	4
	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	12	12	12	48
	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		24	24	24	24	96
	Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Layanan Informasi dan Kehumasan PD		12	12	12	12	48
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan		24	6	0	0	30

	Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1	0	0	0	1
	Subkegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	1	0	0	2
	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		22	5	0	0	27
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4	4	4	4	4
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	12	12	12	48
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12	12	48
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2	2	2	2	8
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	12	12	12	48
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara		47	46	47	46	46
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1	1	1	1	4
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4	4	4	4	16
	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		40	40	40	40	160
	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	1	1	1	4
	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	0	1	0	2

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BPSMB)	Indeks Kepuasan Pelayanan Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	80	77	77	77	77	77
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan (UPTD BPSMB)		60	60	60	60	60
	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	1	1	1	4
	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12	12	12	12	48
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang teradministrasi sesuai dengan Peraturan (UPTD BPSMB)		26	24	24	24	24
	Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1	1	1	1	4
	Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	1	1	1	4
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian (UPTD BPSMB)		60	60	60	60	60
	Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1	1	1	1	4
	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		7	7	7	7	28
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD BPSMB)		60	60	60	60	60
	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	1	1	1	4
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	1	1	1	4
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	1	1	1	4

	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	1	1	1	4
	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	1	1	1	4
	Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1	1	1	1	4
	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	1	1	1	4
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan (UPTD BPSMB)		6	4	4	4	18
	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4	2	2	2	10
	Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	1	1	1	4
	Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	1	1	1	4
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BPSMB)		3	3	3	3	3
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	1	1	1	4
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	1	1	1	4
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	1	1	1	4
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (UPTD BPSMB)		20	20	20	20	20
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1	1	1	1	4

	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2	2	2	2	8
	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10	10	10	10	40
	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	1	1	1	4
	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		6	6	6	6	24
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (RPK)	Indeks Kepuasan Pelayanan Teknis Rumah Promosi dan Kemasan	80	77	77	77	77	77
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan (UPTD RPK)		60	60	60	60	60
	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2	2	2	2	8
	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12	12	12	12	48
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang teradministrasi sesuai dengan Peraturan (UPTD RPK)		14	24	26	35	35
	Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2	2	2	2	8
	Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12	12	12	12	48
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian (UPTD RPK)		60	60	60	60	60

	Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12	12	12	12	48
	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		6	7	8	9	30
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD RPK)		60	60	60	60	60
	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4	4	4	4	16
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4	4	16
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4	4	4	4	16
	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4	4	4	4	16
	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4	4	4	4	16
	Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		2	2	2	2	8
	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2	2	2	2	8
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan (UPTD RPK)		4	12	10	11	37
	Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0	1	2	2	5
	Subkegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan		0	1	0	1	2
	Subkegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	2	0	2	4
	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2	6	7	4	19
	Subkegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		1	1	1	1	4
	Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	0	0	0	1

	Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	1	0	1	2
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD RPK)		3	3	3	3	3
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2	2	2	2	8
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12	12	48
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2	2	2	2	8
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (UPTD RPK)		10	12	16	24	24
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0	0	0	0	0
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0	1	3	5	9
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		0	1	1	2	4
	Subkegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0	0	0	5	5
	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10	10	10	10	40
	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	0	1	1	2
	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	0	1	1	2

Tabel 2.3.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	Kondisi Kinerja Awal RPD	Anggaran pada Tahun ke			
		2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Retribusi Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Jumlah Pendapatan	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
BELANJA DAERAH					
BELANJA OPERASI	18.309.454.813	36.556.356.803	37.228.677.248	39.462.348.361	43.539.767.504
Belanja Pegawai	12.860.508.564	13.102.506.803	13.757.632.248	14.445.513.861	15.167.789.554
Belanja Barang dan Jasa	5.448.946.249	23.453.850.000	23.471.045.000	25.016.834.500	28.371.977.950
BELANJA MODAL	2.959.527.768	7.233.850.000	2.701.750.000	1.932.250.000	2.982.525.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.941.157.768	3.093.850.000	1.536.750.000	1.662.250.000	2.472.525.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.370.000	4.140.000.000	1.165.000.000	270.000.000	510.000.000
Jumlah Belanja	21.268.982.581	43.790.206.803	39.930.427.248	41.394.598.361	46.522.292.504
Total Surplus/(Defisit)	-20.268.982.581	-42.790.206.803	-38.930.427.248	-40.394.598.361	-45.522.292.504
PEMBIAYAAN DAERAH					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
Pembiayaan Neto	-	-	-	-	-

Tabel 2.3.4 Anggaran Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		Kondisi Kinerja Awal RPD	Anggaran pada Tahun			
			2023	2024	2025	2026
			Rp	Rp	Rp	Rp
1		2	3	4	5	6
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	725.599.340	5.025.000.000	5.025.000.000	5.025.000.000	5.025.000.000
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	725.599.340	5.025.000.000	5.025.000.000	5.025.000.000	5.025.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	76.921.583	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	174.651.461	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	474.026.296	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (RPK)	3.813.163.460	3.500.000.000	1.250.000.000	1.500.000.000	4.000.000.000
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.813.163.460	3.500.000.000	1.250.000.000	1.500.000.000	4.000.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.813.163.460	3.500.000.000	1.250.000.000	1.500.000.000	4.000.000.000
3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	81.740.561	1.255.000.000	1.430.000.000	1.480.000.000	1.620.000.000

	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	81.740.561	1.255.000.000	1.430.000.000	1.480.000.000	1.620.000.000
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	26.810.450	200.000.000	230.000.000	250.000.000	270.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	54.930.111	1.055.000.000	1.200.000.000	1.230.000.000	1.350.000.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	470.000.000	545.000.000	600.000.000	665.000.000
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	470.000.000	545.000.000	600.000.000	665.000.000
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	150.000.000	175.000.000	185.000.000	200.000.000
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	-	175.000.000	215.000.000	240.000.000	270.000.000
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	-	145.000.000	155.000.000	175.000.000	195.000.000
5	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	19.269.987	418.000.000	459.800.000	505.780.000	556.358.000
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	-	28.000.000	30.800.000	33.880.000	37.268.000

	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	28.000.000	30.800.000	33.880.000	37.268.000
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	-	31.000.000	34.100.000	37.510.000	41.261.000
	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	31.000.000	34.100.000	37.510.000	41.261.000
	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	19.269.987	62.000.000	68.200.000	75.020.000	82.522.000
	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	-	31.000.000	34.100.000	37.510.000	41.261.000
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	19.269.987	31.000.000	34.100.000	37.510.000	41.261.000
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	-	297.000.000	326.700.000	359.370.000	395.307.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	-	297.000.000	326.700.000	359.370.000	395.307.000
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	188.962.224	675.000.000	600.000.000	735.000.000	840.000.000
	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	188.962.224	675.000.000	600.000.000	735.000.000	840.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	-	325.000.000	270.000.000	400.000.000	500.000.000
	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	188.962.224	250.000.000	180.000.000	170.000.000	160.000.000
	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	-	100.000.000	150.000.000	165.000.000	180.000.000
7	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	176.791.529	1.042.000.000	1.146.200.000	1.260.820.000	1.386.902.000

	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	-	368.000.000	404.800.000	445.280.000	489.808.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	-	251.000.000	276.100.000	303.710.000	334.081.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	-	117.000.000	128.700.000	141.570.000	155.727.000
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	140.169.528	433.000.000	476.300.000	523.930.000	576.323.000
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	33.536.728	183.000.000	201.300.000	221.430.000	243.573.000
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	106.632.800	250.000.000	275.000.000	302.500.000	332.750.000
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	36.622.001	241.000.000	265.100.000	291.610.000	320.771.000
	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	-	-	-	-	-
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	19.668.595	112.000.000	123.200.000	135.520.000	149.072.000
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	16.953.406	129.000.000	141.900.000	156.090.000	171.699.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	-	-	-	-	-
8	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	107.380.464	2.050.000.000	1.925.000.000	2.117.500.000	2.329.250.000
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	107.380.464	2.050.000.000	1.925.000.000	2.117.500.000	2.329.250.000
	Pameran Dagang Internasional/Nasional	-	690.000.000	759.000.000	834.900.000	918.390.000

	Pameran Dagang Lokal	-	-	-	-	-
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	-	735.000.000	478.500.000	526.350.000	578.985.000
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	-	275.000.000	302.500.000	332.750.000	366.025.000
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	107.380.464	350.000.000	385.000.000	423.500.000	465.850.000
9	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	157.678.052	1.087.000.000	1.195.700.000	1.315.270.000	1.446.797.000
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	94.615.336	617.000.000	678.700.000	746.570.000	821.227.000
	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	37.919.399	395.000.000	434.500.000	477.950.000	525.745.000
	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	19.977.328	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	36.718.609	200.000.000	220.000.000	242.000.000	266.200.000
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	63.062.716	470.000.000	517.000.000	568.700.000	625.570.000
	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	63.062.716	425.000.000	467.500.000	514.250.000	565.675.000
	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	-	45.000.000	49.500.000	54.450.000	59.895.000
10	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (BPSMB)	219.233.080	885.000.000	857.000.000	1.007.500.000	1.098.250.000
	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	219.233.080	885.000.000	857.000.000	1.007.500.000	1.098.250.000
	Verifikasi Mutu Produk	77.418.180	250.000.000	275.000.000	302.500.000	332.750.000
	Pengembangan Layanan Pengujian	141.814.900	360.000.000	275.000.000	302.500.000	332.750.000
	Pengembangan Layanan Sertifikasi	-	250.000.000	275.000.000	302.500.000	332.750.000
	Pengembangan Layanan Kalibrasi	-	25.000.000	32.000.000	100.000.000	100.000.000
11	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	57.270.235	1.100.000.000	1.350.000.000	1.600.000.000	1.850.000.000
	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	57.270.235	400.000.000	450.000.000	500.000.000	550.000.000
	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	57.270.235	400.000.000	450.000.000	500.000.000	550.000.000

	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	250.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000
	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	-	250.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000
	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	450.000.000	600.000.000	750.000.000	900.000.000
	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	-	150.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000
	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	150.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	-	150.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000
12	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI (RPK)	181.758.364	438.000.000	380.000.000	424.000.000	718.000.000
	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	-	190.000.000	227.000.000	265.000.000	303.000.000
	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	-	190.000.000	227.000.000	265.000.000	303.000.000
	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	181.758.364	48.000.000	53.000.000	59.000.000	65.000.000
	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	181.758.364	48.000.000	53.000.000	59.000.000	65.000.000
	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	200.000.000	100.000.000	100.000.000	350.000.000
	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	-	200.000.000	100.000.000	100.000.000	350.000.000
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.028.394.524	20.884.715.000	19.752.565.000	19.818.275.000	19.893.131.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.352.321	265.000.000	285.000.000	320.000.000	330.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.252.879	200.000.000	220.000.000	240.000.000	250.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.099.442	65.000.000	65.000.000	80.000.000	80.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.782.933.564	15.635.215.000	15.638.515.000	15.642.145.000	15.646.138.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.782.933.564	15.598.215.000	15.598.215.000	15.598.215.000	15.598.215.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	-	-

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	33.000.000	36.300.000	39.930.000	43.923.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	-
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.232.450	870.000.000	942.000.000	1.016.200.000	1.092.820.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.402	15.000.000	16.500.000	18.150.000	19.965.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.259.110	75.000.000	82.500.000	90.750.000	99.825.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.023.244	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.945.664	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.269.030	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	-	-	-	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.375.000	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.561.000	650.000.000	700.000.000	750.000.000	800.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	-

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.084.000.000	128.250.000	-	-
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	500.000.000	-	-	-
	Pengadaan Mebel	-	30.000.000	20.000.000	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	554.000.000	108.250.000	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.979.609.303	2.238.500.000	2.255.000.000	2.273.150.000	2.293.115.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.910.000	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.399.303	150.000.000	165.000.000	181.500.000	199.650.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	5.000.000	5.500.000	6.050.000	6.655.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.847.300.000	2.073.500.000	2.073.500.000	2.073.500.000	2.073.500.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.266.886	642.000.000	353.800.000	416.780.000	381.058.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.385.888	38.000.000	41.800.000	45.980.000	50.578.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.809.698	80.000.000	88.000.000	96.800.000	106.480.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.510.000	-	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	561.300	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	300.000.000	-	50.000.000	-
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BPSMB)	251.638.591	523.500.000	580.500.000	591.050.000	625.155.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	-	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.785.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.785.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	97.330.354	143.000.000	181.500.000	169.050.000	181.155.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	999.157	5.000.000	5.500.000	6.050.000	6.655.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.998.725	10.000.000	11.000.000	12.000.000	13.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	2.000.000	25.000.000	2.800.000	3.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	4.000.000	3.000.000	3.200.000	3.500.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.161.972	12.000.000	15.000.000	17.000.000	20.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.595.500	10.000.000	17.000.000	18.000.000	20.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.575.000	100.000.000	105.000.000	110.000.000	115.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.687.303	141.500.000	150.000.000	163.000.000	175.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.079.458	21.500.000	20.000.000	23.000.000	25.000.000

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.607.845	120.000.000	130.000.000	140.000.000	150.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.835.934	174.000.000	179.000.000	184.000.000	189.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.036.184	40.000.000	45.000.000	50.000.000	55.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.799.750	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (RPK)	260.102.170	4.218.800.000	1.898.640.000	1.166.314.000	1.511.555.400
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.187.855	58.000.000	63.800.000	70.180.000	77.198.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	43.187.855	57.000.000	62.700.000	68.970.000	75.867.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	2.000.000	2.200.000	2.420.000	2.662.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	58.000.000	67.600.000	77.210.000	86.831.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	57.000.000	66.500.000	76.000.000	85.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.001.327	398.800.000	437.640.000	480.364.000	527.360.400
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.999.705	3.900.000	4.290.000	4.719.000	5.190.900
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.084.553	28.600.000	31.460.000	34.606.000	38.066.600
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.131.329	10.400.000	11.440.000	12.584.000	13.842.400
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.899.849	16.900.000	18.590.000	20.449.000	22.493.900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.300.000	7.800.000	8.580.000	9.438.000	10.381.800
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.585.891	320.800.000	352.880.000	388.168.000	426.984.800
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.999.772	3.605.000.000	1.152.500.000	235.250.000	494.525.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	800.000.000	80.000.000	80.000.000
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	5.000.000	-	5.000.000
Pengadaan Mebel	-	-	20.000.000	-	20.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.999.772	80.000.000	100.000.000	125.000.000	156.250.000
Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	25.000.000	27.500.000	30.250.000	33.275.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	3.500.000.000	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	200.000.000	-	200.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.913.216	87.000.000	153.900.000	154.890.000	155.979.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.513.929	4.000.000	4.400.000	4.840.000	5.324.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.399.287	78.000.000	144.000.000	144.000.000	144.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	5.000.000	5.500.000	6.050.000	6.655.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.000.000	10.000.000	21.000.000	146.000.000	167.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	10.000.000	15.000.000	20.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	1.000.000	1.000.000	2.000.000
Pemeliharaan Mebel	-	-	-	-	5.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	100.000.000	110.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	-	-	20.000.000	20.000.000
Total	21.268.982.581	43.572.015.000	38.395.405.000	39.146.509.000	43.565.398.400

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan

- A) Menjaga stabilitas kondisi produk yang setiap tahun mengalami perubahan harga atau mahal dan selalu berulang baik kebijakan regulasi perlu diatasi agar masyarakat tidak dirugikan, dengan tindak lanjut:
- Melakukan Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok setiap hari di beberapa lokasi Pasar di Kabupaten/Kota;
 - Melakukan Pemantuan Ketersediaan Stok dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok Setiap Minggu di Distributor/Subdistributor;
 - Melaksanakan Penguatan Regulasi Melalui Pemantauan dan Pengawasan HET/HAP Barang Kebutuhan Pokok;
 - Melaksanakan Kegiatan Operasi Pasar/Pasar Murah di Kabupaten/Kota;
 - Melakukan Koordinasi Dengan Tim Satgas Pangan Untuk Melakukan Pengawasan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor/Subdistributor/Ritel Modern;
 - Berkoordinasi dengan Tim Satgas Pangan Untuk Membuat Surat Edaran Gubernur Terkait HET/HAP menjelang HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional).
- B) Meningkatkan kesiagaan dalam menyikapi kenaikan harga pasar dan stok bahan pokok dan memastikan penyediaannya di pasar dengan harga yang stabil, dengan:
- Melakukan Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok setiap hari di beberapa lokasi Pasar di Kabupaten/Kota;
 - Melakukan Pemantauan Ketersediaan Stok dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok Setiap Minggu di Distributor/ Subdistributor;
 - Melaksanakan Penguatan Regulasi Melalui Pemantauan dan Pengawasan HET (Harga Eceran Tertinggi)/HAP (Harga Acuan Penjualan) Barang Kebutuhan Pokok;
 - Penguatan Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok;
 - Meningkatkan Sinergitas dengan Pelaku Usaha Distribusi dan Instansi Terkait guna Menciptakan Ketahanan dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok.

C) Meningkatkan Ekspor untuk komoditas ekspor udang vaname untuk menambah PAD, antara lain:

- Mendorong terbangunnya industri hilir sektor perikanan udang vaname berupa pembangunan cold storage atau industri pengalengan atau industri udang beku/ udang olahan;
- Mendorong terbangunan industri makanan yang terbuat dari udang vaname;
- Perbaiki infrastruktur atau sarana dan prasarana ekspor udang;
- Mendorong Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan resi gudang;
- Adanya kebijakan insentif berupa kemudahan perizinan berusaha dan keringanan pajak bagi perusahaan tambak udang yang melakukan hilirisasi industri udang vaname di Bangka Belitung;
- Melakukan pemetaan potensi udang vaname yang memiliki standard ekspor;
- Melaksanakan pembinaan dan pelatihan ekspor bagi pelaku usaha udang vaname;
- Melakukan pemetaan akses pasar ekspor dan promosi produk ekspor melalui misi dagang dan pameran dagang.

D) Meningkatkan kemasan menjadi lebih menarik dan berdaya saing UPTD Rumah Promosi dan Kemasan berencana akan melakukan beberapa langkah kegiatan, antara lain:

- Mengupgrade kemasan biasa yang ada saat ini, menjadi kemasan yang menggunakan *zipper sealer*, sehingga lebih memudahkan pelaku usaha untuk mengemas produk olahan mereka;
- Penambahan mesin dan peralatan kemasan, khususnya mesin cetak kemasan karton/Kardus dan kemasan *lunch box* (Nasi kotak);
- Penambahan anggaran untuk mendukung promosi lembaga UPTD Rumah Promosi dan Kemasan, karena promosi terhadap keberadaan UPTD Rumah Promosi dan Kemasan serta layanan yang diberikan saat ini masih sangat kurang dan belum *massive*;
- Pengadaan mobil operasional lapangan (*custom*), untuk meningkatkan pelayanan *door to door*, sehingga memudahkan para pelaku usaha dalam mencetak kemasan mereka;
- Penambahan anggaran untuk meningkatkan kompetensi pegawai (ASN dan Honorer) dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan, Seminar dan lain-lain guna meningkatkan kualitas pelayanan;

- Penambahan anggaran untuk membuka wawasan dan pengetahuan pegawai di UPTD Rumah Promosi dan Kemasan dengan melakukan studi banding ke stakeholder terkait;
- Penambahan anggaran untuk pembangunan gedung baru UPTD Rumah Promosi dan Kemasan;
- Dukungan regulasi dari pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif dalam memaksimalkan pemanfaatan Layanan UPTD Rumah Promosi dan Kemasan.

E) Meningkatkan pengujian mutu dan barang, beras juga masuk dalam pengujian mutu barang karena sangat dibutuhkan. Untuk kedepannya bagaimana beras masuk dalam pengujian mutu barang, dengan tindak lanjut:

- Membuat regulasi terkait perdagangan beras dalam kemasan termasuk di dalamnya kewenangan pengawasan dan pengujian terhadap mutu beras dalam kemasan (kelas mutu beras harus sesuai dengan kelas mutu yang tertera di kemasannya);
- UPTD BPSMB akan berkoordinasi dengan dinas/pihak terkait terhadap pelaksanaan regulasi kewenangan pengujian beras yang akan beredar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan UPTD BPSMB akan melaksanakan sosialisasi atas jasa layanan pengujian mutu beras baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media massa dan media sosial) kepada masyarakat dan pelaku usaha;
- Melaksanakan pengawasan terhadap perdagangan beras kemasan dan dalam hal pengujian mutu beras akan diserahkan kepada UPTD BPSMB;
- UPTD BPSMB akan menyediakan ruang/tempat untuk layanan pengaduan masyarakat atas peredaran beras yang tidak sesuai dengan ketentuan.

B A B III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Pada tahap perumusan isu-isu strategis, hanya permasalahan permasalahan pembangunan prioritas yang menjadi agenda utama dalam rencana pembangunan daerah untuk 2 (dua) tahun kedepan berdasarkan pemetaan urusan sesuai Peraturan Kemendagri Nomor 90 Tahun 2019. Berikut ini adalah permasalahan bidang industri dan perdagangan:

A. Urusan Perdagangan

1) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

- Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) ada yang masih bersifat individu/perorangan/petani langsung. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Nomor 14 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya, bahwa “Pengguna Akhir Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat PA-B2 adalah perusahaan industri yang menggunakan B2 sebagai bahan baku/penolong untuk memperoleh nilai tambah, dan/atau badan usaha atau lembaga yang menggunakan bahan berbahaya sebagai bahan penolong dan/atau penelitian sesuai peruntukannya, memiliki izin dari instansi yang berwenang, dan tidak bergerak di bidang pengolahan pangan.
- Tidak adanya laporan tertulis dari Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) tentang realisasi perdagangan bahan berbahaya kepada Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2).
- Masih kurang intensifnya koordinasi dan mekanisme antar lembaga pengawas di daerah terhadap perdagangan Bahan Berbahaya (B2).

2) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

- Adanya kelangkaan pasokan beberapa barang kebutuhan pokok dan barang penting ditengah meningkatnya jumlah permintaan.
- Kenaikan harga beberapa barang kebutuhan pokok dan barang penting ditengah meningkatnya jumlah permintaan.

- Masih kurang intensifnya koordinasi dan mekanisme antara instansi terkait di pemerintahan Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pemantauan dan pengawasan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- Adanya kelangkaan pasokan pupuk bersubsidi dan terlambatnya distribusi pupuk.
- Kurangnya informasi data jumlah pasokan pupuk subsidi dan data penerima/petani pengguna pupuk subsidi.

3) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

- Masih rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya sosialisasi tentang undang-undang perlindungan konsumen, hak advokasi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen serta rendahnya perilaku komplain atau mengungkapkan keluhan dikalangan konsumen agar produsen dapat memberikan pelayanan produk yang sesuai aturan.
- Pada layanan terstandarisasi terdapat permasalahan:
 - Lingkup Layanan pengujian dan sertifikasi yang masih sangat terbatas dikarenakan ketersediaan peralatan untuk pengembangan layanan terstandarisasi sangat terbatas
 - Sinkronisasi regulasi pusat dan daerah yang belum maksimal untuk pemanfaatan layanan laboratorium pengujian di daerah
 - Layanan pengujian sangat tergantung dengan jumlah produksi komoditi daerah

4) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

- Kesulitan dalam mengontrol operasional in-out barang atau produk di tengah-tengah transaksi yang bersifat besar dan cepat.
- Kesulitan untuk menentukan efisiensi transportasi yang nantinya akan digunakan dalam pengiriman barang atau produk hasil produksi.
- Kesulitan dengan jarak yang relatif jauh antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam menjalankan proses distribusi suatu produk atau barang. Jarak bisa saja menjadi salah satu permasalahan yang biasa terjadi di dalam proses distribusi barang dagangan dikarenakan faktor jarak atau lamanya waktu tempuh bisa mengakibatkan kerusakan pada

barang -yang mengakibatkan kualitas barang menjadi turun- pada saat barang dalam proses perjalanan ke tempat tujuan.

- Masih kurang intensifnya koordinasi dan mekanisme antara instansi terkait di pemerintahan Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pemantauan dan pengawasan distribusi barang.

5) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

- Belum Optimalnya pemasaran produk-produk lokal pada pasar lokal maupun luar daerah.
- Penjelasannya :
 - Terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan dalam pemasaran dan promosi,
 - Rendahnya kualitas dan daya saing produk daerah yang berorientasi nasional
 - Kurangnya kreativitas, kapasitas dan kompetensi UMKM terhadap produk dalam negeri

6) Program Pengembangan Ekspor

- Adanya produk ekspor yg tidak tercatat di pabean Pangkalpinang
- Belum adanya pelabuhan ekspor yg layak;
- Turunnya harga komoditas;
- Belum maksimalnya diversifikasi produk ekspor;
- Belum maksimalnya akses pasar ekspor;
- asih rendahnya kapasitas SDM dan produk ekspor;
- Tingginya biaya pengiriman produk ekspor.
- Penyebab penurunan ekspor non migas tahun 2018 dan 2019
 - Target nilai ekspor produk non migas pada tahun 2018 sebesar 1 700, sementara realisasi ekspor non migas tahun 2018 sebesar (USD juta) 1 563. Hal tersebut disebabkan turunnya jumlah ekspor komoditi timah karena adanya surat edaran bersama ICDX dan ICH tentang pencabutan kewenangan surveyor Indonesia dalam memverifikasi asal usul biji timah. Produksi yang telah di verifikasi oleh lembaga survei tersebut tidak dapat di ekspor.
 - Target nilai ekspor produk non migas pada tahun 2019 sebesar 1 800, sementara realisasi ekspor non migas tahun 2019 sebesar (USD juta) 1 294. Hal tersebut disebabkan karena adanya syarat CPI (competent

person of Indonesia) dalam pengajuan RKAB (Rencana Kegiatan Anggaran Belanja) dan hanya ada empat perusahaan yang memenuhi persyaratan tersebut.

B. Urusan Perindustrian

1) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

- Industri paling banyak ditemukan di Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkalpinang. Jumlah Industri Kecil 15.108 Unit, sedangkan Industri Sedang berjumlah 106 Unit dan Industri Besar sebesar 98 Unit secara total terdapat 15.312 Unit dengan total tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 52.043 orang. Persentase pertumbuhan jumlah industri tercatat 18.36 % dari tahun sebelumnya
- Pada tahun 2019, Jumlah Industri Kecil 17.024 Unit, sedangkan Industri Sedang berjumlah 99 Unit dan Industri Besar sebesar 88 Unit secara total terdapat 17.211 Unit dengan total tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 48.327 orang. Persentase pertumbuhan jumlah industri tercatat 12.40 % dari tahun sebelumnya. Untuk 88 Industri Besar di Provinsi Kep. Bangka Belitung yang menyerap 8.323 tenaga kerja.
- Sekitar 40% Industri Besar dan Sedang ini merupakan Industri yang bergerak di sektor makanan, 23% persen Industri Logam Dasar, dan 15 % Industri Barang Galian Bukan Logam.
- Pada tahun 2020, Jumlah Industri Kecil 18.607 Unit, sedangkan Industri Sedang berjumlah 100 Unit dan Industri Besar sebesar 88 Unit dan secara total terdapat 18.795 Unit dengan total tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 50.553 orang. Persentase pertumbuhan jumlah industri tercatat 9.20 % dari tahun sebelumnya. Ada tercatat 88 industri besar dan sedang di Provinsi Kep. Bangka Belitung yang menyerap 8.318 tenaga kerja.
- Untuk tahun 2021, diasumsikan akan terjadi penurunan jumlah unit usaha untuk sektor industri karena seluruh sendi ekonomi Babel tertekan akibat pandemi COVID-19. Hal ini membuat persentase pertumbuhan jumlah industri di setting mengalami perlambatan kenaikan hanya 2% saja

2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri

- Kepatuhan perusahaan industri dalam penyampaian data dan informasi industri masih rendah.
- Penjelasan : Industri yang sesuai izin usaha industri (IUI) memenuhi 3 aspek, yang salah satunya merupakan penyampaian data dan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian no. 15/2019, untuk penyampaian tersebut perusahaan industri terlebih dahulu harus memiliki akun SIINas, kondisi saat ini baru 30% perusahaan industri yang memiliki akun SIINas, sehingga tingkat kepatuhan perusahaan industri masih rendah terhadap penyampaian data dan informasi.

3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

- Kepatuhan Perusahaan Industri/Pelaku Usaha dalam kewajiban memiliki akun SIINas masih rendah, sesuai Peraturan Menteri Perindustrian no. 15/2019 pasal 3 ayat 2” Pelaku Usaha yang memperoleh Perizinan Bemsaha di sektor perindustrian wajib memiliki Akun SIINas”.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Bahwa Periode Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 2017-2022. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Verakhir Pada Tahun 2022, Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 atau RPJMD selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Maka Visi mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Tahun 2005-2025 : “TERWUJUDNYA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEBAGAI WILAYAH AGRI-BAHARI YANG MAJU BERWAWASAN

LINGKUNGAN, DIDUKUNG OLEH SUMBER DAYA MANUSIA HANDAL DAN PEMERINTAH YANG AMANAH MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”.

Dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan:

- 1) Meningkatnya ekonomi Daerah
- 2) Terpenuhiya kapasitas dan kualitas SDM
- 3) Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
- 4) Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi
- 5) Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat
- 6) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam

Untuk mencapai ke 6 (enam) tujuan ini, maka ditetapkan sasaran sejumlah 20 (dua puluh) sasaran, yaitu:

- 1) Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian
- 2) Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan
- 3) Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian
- 4) Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan
- 5) Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan
- 6) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik
- 7) Meningkatnya Ekspor
- 8) Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah
- 9) Meningkatnya Pembangunan Manusia
- 10) Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi
- 11) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
- 12) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur
- 13) Meningkatkan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang
- 14) Menurunnya Resiko Bencana
- 15) Percepatan pembangunan kawasan perdesaan
- 16) Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk
- 17) Menurunkan Tingkat Kemiskinan
- 18) Meningkatkan Kesempatan Kerja
- 19) Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Analisis Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L serta untuk mengidentifikasi apakah sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI.

3.3.1. Renstra Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020 – 2024

Kementerian Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dituntut untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan perindustrian. Tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu *“Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional”*.

Penekanan sasaran strategis jangka menengah Kementerian Perindustrian 2020 – 2024. yang terkait dengan tugas-tugas pembangunan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Prespective) Sasaran strategis pertama (SS-1): Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas
2. Perspektif Pelanggan (Customer Perspective) Sasaran strategis kedua (SS2): Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
3. Sasaran strategis ketiga (SS-3): Meningkatkan Kemampuan Industri Dalam Negeri
4. Sasaran strategis keempat (SS-4): Meningkatkan Penguasaan Pasar Industri
5. Sasaran strategis kelima (SS-5): Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
6. Sasaran strategis keenam (SS-6): Meningkatkan Persebaran Industri
7. Sasaran strategis ketujuh (SS-7): Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif.

8. Sasaran strategis kedelapan (SS-8): Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
9. Sasaran strategis kesembilan (SS-9): Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
10. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10): Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian
11. Sasaran strategis kesebelas (SS-11): Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas
12. Sasaran strategis kesebelas (SS-11): Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas
13. Sasaran strategis kedua belas (SS-12): Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
14. Sasaran strategis ketiga belas (SS-13): Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel

Fokus Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Kementerian Perindustrian berkontribusi dalam Agenda Pembangunan I yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”. Kebijakan pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi akan dilakukan dengan melaksanakan peningkatan nilai tambah ekonomi.

Kementerian Perindustrian juga turut berperan Mengembangkan wilayah untuk dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan 3 yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Kebijakan pembangunan manusia yang terkait dengan sektor industri diarahkan pada peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

3.3.2. Renstra Kementerian Perdagangan RI Tahun 2020 – 2024

Dalam rangka mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dalam bidang perdagangan luar negeri, Kementerian Perdagangan menetapkan tujuan peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa adalah *Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa* sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional.

- 1) Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa
- 2) Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Stabilisasi Harga Dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok
- 3) Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab
- 4) Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri
- 5) Sasaran Strategis 5: Optimalnya Peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)
- 6) Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kinerja Perdagangan Yang Bersih, Akuntabel Dan Profesional
- 7) Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan

Maka arah kebijakan Perdagangan dapat dijabarkan menjadi 12 (dua belas) pokok pikiran yaitu:

- 1) Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor
- 2) Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional
- 3) Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok
- 4) Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok
- 5) Peningkatan pemberdayaan konsumen
- 6) Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur
- 7) Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri
- 8) Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)
- 9) Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan
- 10) Penguatan Pelayanan Publik yang Prima
- 11) Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian
- 12) Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi.

3.4. Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam kurun waktu 2017 – 2022, beberapa isu – isu strategis yang diperkirakan masih berpengaruh terhadap aktivitas industri dan perdagangan Provinsi Bangka Belitung kedepan adalah:

1. Masih rendahnya nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan sektor industri yang pada tahun 2020 berdampak tumbuh negatif di -5,64 %, dan pada tahun 2021 tumbuh 5,44 %, namun masih menyisakan permasalahan antara lain:

- a. Belum optimalnya pengembangan Kawasan industri dan Kawasan Peruntukkan industri
- b. Pengembangan Kawasan Industri Sadai masih dalam proses penjanrinnan investasi dan pengembangan kawasan
- c. Masih belum optimalnya tata kelola industri pengolahan
- d. Masih rendahnya pengembangan produk potensial ekspor
- e. Belum maksimalnya pemetaan potensi ekspor
- f. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan industri dalam penyampaian data dan informasi industri
- g. Masih rendahnya kepatuhan Perusahaan Industri/Pelaku Usaha dalam kewajiban memiliki akun SIINas

2. Masih rendahnya nilai Lapangan Usaha Perdagangan

Pertumbuhan sektor perdagangan pum mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 akibat terdampak pandemi di -4,62 % namun cukup mampu bangkit tumbuh di tahun 2021 sebesar 5,78 %, seiring meningkatnya permintaan ekspor terhadap komoditi yang berasal dari Bangka Belitung dan mengalami kenaikan harga komoditi yang cukup tinggi. Namun pada sektor perdagangan ini masih menyisakan permasalahan antara lain:

- a. Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) ada yang masih bersifat individu/perorangan/petani langsung.
- b. Kesulitan dalam mengontrol operasional in-out barang atau produk di tengah-tengah transaksi yang bersifat besar dan cepat.

- c. Adanya kelangkaan pasokan beberapa barang kebutuhan pokok dan barang penting ditengah meningkatnya jumlah permintaan.
- d. Adanya kelangkaan pasokan pupuk bersubsidi dan terlambatnya distribusi pupuk.
- e. Belum maksimalnya tata kelola ekspor, pendataan ekspor, promosi dan peningkatan kapasitas SDM dan produk Ekspor
- f. Masih rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen.
- g. Lingkup Layanan pengujian dan sertifikasi yang masih sangat terbatas
- h. Belum Optimalnya pemasaran produk-produk lokal pada pasar lokal maupun luar daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2017 -2022 disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022. Seperti yang telah di sampaikan pada BAB 3 sebelumnya bahwa visi daerah 2017-2022 adalah “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”. Dengan Misi yang di ampuhkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu Misi 1 - Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah yang dapat digambarkan pada Table 4.1 berikut:

Tabel 4.1.1 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Histori Realisasi Capaian Renstra Tahun					Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan Tahun				Kondisi Kinerja Akhir RPD
			2017	2018	2019	2020	2021		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi	Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	6,15	3,97	1,2	-5,64	5,44	2	3,25	3,5	3,75	4	4
2	Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan	7,81	2,64	1,76	-4,62	5,78	2	2,5	2,75	3	3,25	3,25
3	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Predikat RB Perangkat Daerah (Disperindag)						65	67	67	67	67	67

Tabel 4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Histori Realisasi Capaian Renstra Tahun					Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Sasaran Tahun				Kondisi Kinerja Akhir RPD
			2017	2018	2019	2020	2021		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	14,230	15,063	14,849	14,170	17,925	14,500	15,250	16,000	16,750	17,500	17,500
2	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	10,841	11,471	11,968	11,583	12,666	11,750	12,250	12,900	13,550	14,200	14,200
3	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah (Disperindag)						65,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000

4.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sedangkan matriks hubungan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat digambarkan seperti Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dengan Tujuan dan Sasaran RPD

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya ekonomi Daerah	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi	Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan
	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan	Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Predikat RB Perangkat Daerah (Disperindag)	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah (Disperindag)

Tabel 4.2.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD menyesuaikan PMDN90 dan KMDN050-3078

VISI	MISI	TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN DISPERINDAG	SASARAN DISPERINDAG	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya ekonomi Daerah	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi		Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan
					Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan
		Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub	Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan		Persentase Pertumbuhan Lapangan

			Sektor Perdagangan			Usaha Perdagangan
					Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan
		Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Predikat RB Perangkat Daerah (Disperindag)
					Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah (Disperindag)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Revisi Renstra ini adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPD 2023-2026. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara Dinas Perindustrian dan Perdagangan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD 2023-2026 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Strategi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagisetiap program prioritas RPD 2023-2026 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tabel dibawah ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam tahun- ahun kedepan.

Tabel 5.1.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Misi 1. Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis Agri-Bahari									
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ ARAH KEBIJAKAN RPJPD	ARAH KEBIJAKAN TAHUN			
						2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja			
			Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan	Peningkatan Produktifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Perdagangan	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk			
Misi 3. Mewujudkan ketatapemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance)									
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ ARAH KEBIJAKAN RPJPD	ARAH KEBIJAKAN TAHUN			
						2023	2024	2025	2026
2	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah melalui penataan dan pemberdayaan birokrasi yang bersih, responsif dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.	Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat			

Tabel 5.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan menyesuaikan PMDN90 dan KMDN050-3078
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Misi 1. Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis Agri-Bahari					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Bidang Urusan	Program
Meningkatnya Nilai Tambah Produksi	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja	Perencanaan dan Pengembangan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
				UPTD Rumah Promosi dan Kemasan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
				Pengendalian dan Fasilitasi Usaha Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Peningkatan Produktifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Perdagangan	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk	Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
					Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
				UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
				Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
					Program Pengembangan Ekspor
					Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

				UPTD Rumah Promosi dan Kemasan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Misi 3. Mewujudkan ketatapemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance)					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Bidang Urusan	Program
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Meningkatkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah melalui penataan dan pemberdayaan birokrasi yang bersih, responsif dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.	Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				UPTD Rumah Promosi dan Kemasan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran

Sasaran utama dalam meningkatkan profesionalitas aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu meningkatnya kompetensi aparatur serta meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur. Untuk mencapai kedua sasaran ini perlu didukung oleh beberapa program yang kemudian dilaksanakan dalam kegiatan dan sub kegiatan.

Program yang ditetapkan merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran. Semula ada 5 (lima) Program yang diusungkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri dari 1 (satu) program rutin dan 5 (lima) program teknis yang kemudian hasil evaluasi tim satgas SAKIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berubah menjadi 1 (satu) program rutin dan 5 (lima) program teknis, dan dengan terakhir dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berubah kembali menjadi 9 (sembilan) dan program teknis 1 (satu) program rutin, dengan rincian sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2021

1. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan UPTD Rumah Promosi dan Kemasan, dengan 2 indikator:

- Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Industri
- Persentase Kemasan Produk IKM yang diproduksi (UPTD RPK)

yang akan dicapai melalui kegiatan:

- Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
- Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPK)

2. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan 1 indikator:

- Prosentase Industri yang sesuai Izin Usaha Industri

yang akan dicapai melalui kegiatan:

- Penerbitan Usaha Industri (IUI), Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi

3. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan 1 indikator:

- o Prosentase data informasi industri di SIINas

yang akan dicapai melalui kegiatan:

- Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

4. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan 2 indikator:

- o Persentase Tertib Usaha

yang akan dicapai melalui kegiatan:

- Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar

5. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan 1 indikator:

- o Persentase Barang terdistribusi

yang akan dicapai melalui kegiatan:

- Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Lelang Komoditas

6. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan 1 indikator:

- o Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok

yang akan dicapai melalui kegiatan:

- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
- Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten / Kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
- Pengawasan Pupuk dan Peptisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

7. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan 1 indikator:

- o Persentase Pertumbuhan nilai ekspor

yang akan dicapai melalui kegiatan:

- Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Lebih Dari 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi

8. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, dengan 2 indikator:

- o Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen
- o Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (UPTD BPSMB)

yang akan dicapai melalui kegiatan:

- Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota
- Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah (BPSMB)
- Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

9. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan UPTD Rumah Promosi dan Kemasan, dengan 2 indikator:

- o Jumlah Produk Lokal yang digunakan dan dipasarkan
- o Persentase Produk IKM yang dipasarkan (UPTD RPK)

yang akan dicapai melalui kegiatan:

- Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
- Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (RPK)

10. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan UPTD Rumah Promosi dan Kemasan, dengan 4 indikator:

- o Nilai Sakip Perangkat Daerah (Disperindag)
- o Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Disperindag)
- o Survey Kepuasan Pelayanan Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
- o Survey Kepuasan Pelayanan Teknis Rumah Promosi dan Kemasan

yang akan dicapai melalui kegiatan:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (BPSMB)
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (BPSMB)
- Administrasi Umum Perangkat Daerah (BPSMB)
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BPSMB)
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSMB)
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSMB)
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (RPK)
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (RPK)
- Administrasi Umum Perangkat Daerah (RPK)
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RPK)
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RPK)
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RPK)

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1	2	3	4
Meningkatnya Nilai Tambah Produksi			Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan
	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan		Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Industri
		Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Sebaran Wilayah Industri
		Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
			Jumlah Tenaga Kerja Industri Pengolahan
			Jumlah Sumberdaya Industri yang dibina
			Jumlah Pelaku Industri terbina dengan kategori baik
		Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
			Jumlah Sarana Prasarana Kawasan Industri
		Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
			Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)

		Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
			Jumlah dokumen perencanaan dan laporan penerapan dan evaluasi RPIP
		Subkegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
			Tersusunnya Risalah Naskah Penelitian Pertumbuhan Industri
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (RPK)	Persentase Fasilitas Layanan Desain dan Kemasan Produk UMKM yang diproduksi (UPTD RPK)
		Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitas Design dan produksi produk label/kemasan
			Jumlah Laporan pengelolaan bahan baku, gudang, mesin dan peralatan
		Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Perusahaan Industri dan Kawasan Industri
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang diterbitkan
			Jumlah Dokumen Berita Acara Verifikasi Teknis Perusahaan Industri dan Kawasan Industri

			Jumlah Dokumen Berita Acara Verifikasi Teknis Izin Perluasan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri
		Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: Industri Besar; dan Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
			Persentase Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan Industri dan Kawasan Industri
			Jumlah Laporan Perusahaan Industri yang Diawasi
			Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang diawasi
			Jumlah Peserta Rakor Wasdal
			Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Bidang Perindustrian
			Jumlah Peserta Rakor Industri Hijau
			Jumlah Peserta Rakor Pengawasan Kawasan Industri
			Jumlah Peserta Rakor Pengembangan Hilirisasi Industri

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri pada Akun SIINas
		Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Laporan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
			Jumlah Peserta Bimtek
		Subkegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
			Jumlah Peserta Diseminasi
			Jumlah Dokumen Publikasi Data SIINas
		Subkegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas
			Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang dipantau dan dievaluasi
		Subkegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas
Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan			Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan

	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan		Nilai Lapangan Usaha Perdagangan
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Tertib Usaha
		Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki perizinan
		Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha perdagangan B2 yang memiliki perizinan Perdagangan B2
		Subkegiatan Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah Pelaku Usaha yang memenuhi komitmen/rekomendasi
		Subkegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission
		Subkegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya

		Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase SKA dan Pelaku Ekspor yang terpantau
		Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase Barang terdistribusi
		Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Persentase sarana distribusi yang terkelola
		Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
		Subkegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
		Subkegiatan Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok
		Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan Penting
		Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor
		Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor

		Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok
		Subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
		Subkegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
		Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase kinerja realisasi pupuk
		Subkegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi
		Subkegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen
		Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan konsumen
		Subkegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif
		Subkegiatan Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif

		Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani
		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
		Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi
		Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (BPSMB)	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (UPTD BPSMB)
		Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penambahan dan pemeliharaan Ruang lingkup (UPTD BPSMB)
			Jumlah Laporan Pemeliharaan Ruang Lingkup
			Jumlah Laporan Pemeliharaan Parameter Pengujian
			Jumlah Laporan Penambahan Parameter Pengujian
		Subkegiatan Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau
			Persentase sampel yang diuji sesuai ketentuan yang berlaku
			Jumlah sampel Lada yang diuji
			Jumlah sampel CPO yang diuji
			Jumlah sampel Pengujian Beras
		Subkegiatan Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang
			Persentase sampel yang diuji sesuai ketentuan yang berlaku
		Subkegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan

			Persentase jumlah alat yang dikalibrasi
		Subkegiatan Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan nilai ekspor
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Komoditi/Produk Yang dipromosikan
		Subkegiatan Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang
		Subkegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan
		Subkegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi
			Jumlah Laporan Nilai Ekspor
		Subkegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk Lokal yang digunakan, dipromosikan dan dipasarkan melalui Akses Pasar
		Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah produk lokal yang dipromosikan
		Subkegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Promosi Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri
		Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk lokal yang dipasarkan
		Subkegiatan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi

		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk Lokal yang digunakan
		Subkegiatan Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer
			Jumlah Pemahaman Generasi Muda dalam Penggunaan Produk Dalam Negeri
		Subkegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri
			Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan akses pasar online
		Subkegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Jaringan Informasi Perdagangan
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI (RPK)	Persentase Fasilitasi Produk UMKM yang dipasarkan (UPTD RPK)
		Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang terfasilitasi desain promosi dan atau media promosi
		Subkegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri
		Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang terfasilitasi pemasaran
		Subkegiatan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi

		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pengembangan kelembagaan (UPTD, Rumah Promosi dan Kemasan)
		Subkegiatan Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			Predikat RB Perangkat Daerah (Disperindag)
	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		Nilai RB Perangkat Daerah (Disperindag)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Disperindag)
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Disperindag)
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan
			Jumlah Dokumen SPM
			Jumlah Dokumen SPP
			Jumlah Dokumen Rekapitulasi Daftar Gaji dan Tunjangan
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Gaji
		Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

			Jumlah Dokumen pengujian/verifikasi
			Jumlah Dokumen Penatausahaan pengeluaran
		Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
		Subkegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang teradministrasi sesuai dengan Peraturan
		Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
		Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Subkegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian
		Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
		Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
		Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
		Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
		Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
		Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
			Jumlah Laporan Layanan Informasi dan Kehumasan PD
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan

		Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
		Subkegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
		Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
		Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara
		Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
		Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
		Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
		Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

		Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BPSMB)	Indeks Kepuasan Pelayanan Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan (UPTD BPSMB)
		Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang teradministrasi sesuai dengan Peraturan (UPTD BPSMB)
		Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian (UPTD BPSMB)
		Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD BPSMB)

		Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
		Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
		Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
		Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
		Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
		Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan (UPTD BPSMB)
		Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
		Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
		Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BPSMB)
		Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

		Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (UPTD BPSMB)
		Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
		Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
		Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
		Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
		Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (RPK)	Indeks Kepuasan Pelayanan Teknis Rumah Promosi dan Kemasan
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan (UPTD RPK)
		Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang teradministrasi sesuai dengan Peraturan (UPTD RPK)
		Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian (UPTD RPK)
		Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD RPK)
		Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
		Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
		Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
		Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
		Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan (UPTD RPK)

		Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
		Subkegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan
		Subkegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
		Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
		Subkegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan
		Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
		Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD RPK)
		Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
		Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (UPTD RPK)
		Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya

		Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
		Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya
		Subkegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
		Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
		Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
		Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Tabel 6.2 Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Industri	Perindustrian	1%	2,50%	5.025.000.000	2,50%	5.025.000.000	2,75%	5.025.000.000	2,75%	5.025.000.000	2,75%
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					5.025.000.000		5.025.000.000		5.025.000.000		5.025.000.000	
		Jumlah Sebaran Wilayah Industri			1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	4
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	60
		Jumlah Tenaga Kerja Industri Pengolahan			51000	1.500.000.000	51500	1.500.000.000	52000	1.500.000.000	52500	1.500.000.000	52500
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			8	1.500.000.000	8	1.500.000.000	8	1.500.000.000	8	1.500.000.000	32
		Jumlah Sarana Prasarana Kawasan Industri			1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	4
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			8	500.000.000	8	500.000.000	8	500.000.000	8	500.000.000	32
		Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)			5,2 T	2.500.000.000	5,4 T	2.500.000.000	5,6 T	2.500.000.000	5,8 T	2.500.000.000	5,8 T
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			6	2.500.000.000	6	2.500.000.000	6	2.500.000.000	6	2.500.000.000	24

		Jumlah dokumen perencanaan dan laporan penerapan dan evaluasi RPIP			2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	8
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	48
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (RPK)	Persentase Fasilitas Layanan Desain dan Kemasan Produk UMKM yang diproduksi (UPTD RPK)	Perindustrian	70%	60%	3.500.000.000	60%	1.250.000.000	70%	1.500.000.000	70%	4.000.000.000	70%
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					3.500.000.000		1.250.000.000		1.500.000.000		4.000.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Design dan Produksi label/kemasan dan pengelolaan bahan baku, gudang, mesin dan peralatan (UPTD RPK)			24	3.500.000.000	24	1.250.000.000	24	1.500.000.000	24	4.000.000.000	96
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			150	3.500.000.000	165	1.250.000.000	182	1.500.000.000	200	4.000.000.000	697
2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Perusahaan Industri dan Kawasan Industri	Perindustrian	60%	60%	200.000.000	65%	230.000.000	70%	250.000.000	75%	270.000.000	75%
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi					1.255.000.000		1.430.000.000		1.480.000.000		1.620.000.000	
		Jumlah Laporan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri			1	200.000.000	1	230.000.000	1	250.000.000	1	270.000.000	4

		(IPKI) Kewenangan Provinsi yang diterbitkan											
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: Industri Besar; dan Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi			20	200.000.000	27	230.000.000	34	250.000.000	45	270.000.000	126
		Jumlah Laporan Perusahaan Industri yang Diawasi			1	1.055.000.000	1	1.200.000.000	1	1.230.000.000	1	1.350.000.000	4
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi			2	1.055.000.000	2	1.200.000.000	2	1.230.000.000	2	1.350.000.000	8
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri pada Akun SIINas	Perindustrian	70%	80%	470.000.000	85%	545.000.000	90%	600.000.000	95%	665.000.000	95%
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					470.000.000		545.000.000		600.000.000		665.000.000	

		Jumlah Laporan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUJ, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			1	150.000.000	1	175.000.000	1	185.000.000	1	200.000.000	4
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			2	150.000.000	2	175.000.000	2	185.000.000	2	200.000.000	8
		Jumlah Peserta Diseminasi			50	175.000.000	60	215.000.000	75	240.000.000	85	270.000.000	270
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas			2	175.000.000	2	215.000.000	2	240.000.000	2	270.000.000	8
		Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang dipantau dan dievaluasi			50	145.000.000	55	155.000.000	60	175.000.000	65	195.000.000	230
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas			2	145.000.000	2	155.000.000	2	175.000.000	2	195.000.000	8
4	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Tertib Usaha	Perdagangan	100%	100%	418.000.000	100%	459.800.000	100%	505.780.000	100%	556.358.000	100%
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor					28.000.000		30.800.000		33.880.000		37.268.000	
		Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki perizinan			2	28.000.000	4	30.800.000	4	33.880.000	4	37.268.000	14

	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			1	28.000.000	1	30.800.000	1	33.880.000	1	37.268.000	4
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi					31.000.000		34.100.000		37.510.000		41.261.000	
		Jumlah Pelaku Usaha perdagangan B2 yang memiliki perizinan Perdagangan B2			2	31.000.000	4	34.100.000	4	37.510.000	4	41.261.000	14
	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			1	31.000.000	1	34.100.000	1	37.510.000	1	41.261.000	4
	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar					62.000.000		68.200.000		75.020.000		82.522.000	
		Jumlah Pelaku Usaha yang memenuhi komitmen/rekomendasi			2	62.000.000	4	68.200.000	4	75.020.000	4	82.522.000	14
	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission			2	31.000.000	2	34.100.000	2	37.510.000	2	41.261.000	8
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya			2	31.000.000	2	34.100.000	2	37.510.000	2	41.261.000	8

	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)					297.000.000		326.700.000		359.370.000		395.307.000	
		Persentase SKA dan Pelaku Ekspor yang terpantau			100%	297.000.000	100%	326.700.000	100%	359.370.000	100%	395.307.000	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal			12	297.000.000	12	326.700.000	12	359.370.000	12	395.307.000	48
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase Barang terdistribusi	Perdagangan	12%	82%	675.000.000	84%	600.000.000	86%	735.000.000	88%	840.000.000	88%
	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas					675.000.000		600.000.000		735.000.000		840.000.000	
		Persentase sarana distribusi yang dikelola			47%	675.000.000	50%	600.000.000	52%	735.000.000	55%	840.000.000	55%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi			1	325.000.000	1	270.000.000	1	400.000.000	1	500.000.000	4
	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi			26	250.000.000	28	180.000.000	30	170.000.000	32	160.000.000	116
	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi			4	100.000.000	4	150.000.000	4	165.000.000	4	180.000.000	16
6	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Perdagangan	9,20%	8,50%	1.042.000.000	8,30%	1.146.200.000	8,20%	1.260.820.000	8,00%	1.386.902.000	8,00%
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi					368.000.000		404.800.000		445.280.000		489.808.000	
		Persentase jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan Penting			75%	368.000.000	75%	404.800.000	77%	445.280.000	77%	489.808.000	77%

	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor			12	251.000.000	12	276.100.000	12	303.710.000	12	334.081.000	48
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor			12	117.000.000	12	128.700.000	12	141.570.000	12	155.727.000	48
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					433.000.000		476.300.000		523.930.000		576.323.000	
		Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok			75%	433.000.000	75%	476.300.000	77%	523.930.000	77%	576.323.000	77%
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota			12	183.000.000	12	201.300.000	12	221.430.000	12	243.573.000	48
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			12	250.000.000	14	275.000.000	14	302.500.000	14	332.750.000	54
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya					241.000.000		265.100.000		291.610.000		320.771.000	
		Persentase kinerja realisasi pupuk			90%	241.000.000	90%	265.100.000	90%	291.610.000	90%	320.771.000	90%

	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi			6	112.000.000	8	123.200.000	10	135.520.000	12	149.072.000	36
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%			6	129.000.000	8	141.900.000	10	156.090.000	12	171.699.000	36
7	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen	Perdagangan	40	42	1.087.000.000	43	1.195.700.000	43	1.315.270.000	44	1.446.797.000	44
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					617.000.000		678.700.000		746.570.000		821.227.000	
		Persentase penanganan pengaduan konsumen			100%	617.000.000	100%	678.700.000	100%	746.570.000	100%	821.227.000	100%
	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif			1	395.000.000	1	434.500.000	1	477.950.000	1	525.745.000	4
	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif			2	22.000.000	2	24.200.000	2	26.620.000	2	29.282.000	8
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani			41	200.000.000	42	220.000.000	43	242.000.000	43	266.200.000	169
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					470.000.000		517.000.000		568.700.000		625.570.000	
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			83%	470.000.000	88%	517.000.000	93%	568.700.000	100%	625.570.000	100%
	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi			12	425.000.000	12	467.500.000	12	514.250.000	12	565.675.000	48
	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani			12	45.000.000	12	49.500.000	12	54.450.000	12	59.895.000	48
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (BPSMB)	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (UPTD BPSMB)	Perdagangan	100%	100%	885.000.000	100%	857.000.000	100%	1.007.500.000	100%	1.098.250.000	100%

	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					885.000.000		857.000.000		1.007.500.000		1.098.250.000	
		Jumlah penambahan dan pemeliharaan Ruang lingkup (UPTD BPSMB)			1	250.000.000	1	275.000.000	1	302.500.000	1	332.750.000	1
	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau			1	250.000.000	1	275.000.000	1	302.500.000	1	332.750.000	1
		Persentase sampel Komoditi yang diuji sesuai ketentuan yang berlaku			85%	360.000.000	87%	275.000.000	89%	302.500.000	90%	332.750.000	90%
	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang			275	360.000.000	320	275.000.000	365	302.500.000	410	332.750.000	1370
		Persentase sampel yang diuji sesuai ketentuan yang berlaku (Sertifikasi)			100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	302.500.000	100%	332.750.000	100%
	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan			1	250.000.000	1	275.000.000	1	302.500.000	1	332.750.000	4
		Persentase jumlah alat yang dikalibrasi			80%	25.000.000	80%	32.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%
	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan			5	25.000.000	10	32.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	55
8	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan nilai ekspor	Perdagangan	6%	4%	2.050.000.000	4,50%	1.925.000.000	5%	2.117.500.000	6%	2.329.250.000	6%
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi					2.050.000.000		1.925.000.000		2.117.500.000		2.329.250.000	
		Jumlah Komoditi/Produk Yang dipromosikan			2	1.700.000.000	3	1.540.000.000	4	1.694.000.000	5	1.863.400.000	14
	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang			4	690.000.000	5	759.000.000	6	834.900.000	7	918.390.000	22
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan			2	735.000.000	3	478.500.000	4	526.350.000	5	578.985.000	14
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi			3	275.000.000	4	302.500.000	5	332.750.000	6	366.025.000	18

		Jumlah Laporan Nilai Ekspor			12	350.000.000	12	385.000.000	12	423.500.000	12	465.850.000	48
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina			25	350.000.000	30	385.000.000	35	423.500.000	40	465.850.000	130
9	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk Lokal yang digunakan, dipromosikan dan dipasarkan melalui Akses Pasar	Perdagangan	12%	60%	1.100.000.000	65%	1.350.000.000	70%	1.600.000.000	75%	1.850.000.000	75%
	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri					400.000.000		450.000.000		500.000.000		550.000.000	
		Jumlah produk lokal yang dipromosikan			10	400.000.000	12	450.000.000	14	500.000.000	16	550.000.000	52
	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Promosi Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri			10	400.000.000	12	450.000.000	14	500.000.000	16	550.000.000	52
	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri					250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000	
		Jumlah produk lokal yang dipasarkan			10	250.000.000	12	300.000.000	14	350.000.000	16	400.000.000	52
	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi			10	250.000.000	12	300.000.000	14	350.000.000	16	400.000.000	52
	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					450.000.000		600.000.000		750.000.000		900.000.000	
		Jumlah produk Lokal yang digunakan			10	150.000.000	12	200.000.000	14	250.000.000	16	300.000.000	52
	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer			10	150.000.000	12	200.000.000	14	250.000.000	16	300.000.000	52
		Jumlah Pemahaman Generasi Muda dalam Penggunaan Produk Dalam Negeri			25	150.000.000	30	200.000.000	35	250.000.000	40	300.000.000	130

	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri			25	150.000.000	30	200.000.000	35	250.000.000	40	300.000.000	130
		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan akses pasar online			10	150.000.000	12	200.000.000	14	250.000.000	16	300.000.000	52
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Jaringan Informasi Perdagangan			10	150.000.000	12	200.000.000	14	250.000.000	16	300.000.000	52
4	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI (RPK)	Persentase Fasilitasi Produk UMKM yang dipasarkan (UPTD RPK)	Perdagangan	70%	40%	438.000.000	40%	380.000.000	50%	424.000.000	50%	718.000.000	50%
	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri					190.000.000		227.000.000		265.000.000		303.000.000	
		Jumlah UMKM yang terfasilitasi desain promosi dan atau media promosi			25	190.000.000	30	227.000.000	35	265.000.000	40	303.000.000	130
	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri			25	190.000.000	30	227.000.000	35	265.000.000	40	303.000.000	130
	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri					48.000.000		53.000.000		59.000.000		65.000.000	
		Jumlah UMKM yang terfasilitasi pemasaran			25	48.000.000	28	53.000.000	31	59.000.000	34	65.000.000	118
	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi			25	48.000.000	28	53.000.000	31	59.000.000	34	65.000.000	118
	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					200.000.000		100.000.000		100.000.000		350.000.000	
		Jumlah Laporan Pengembangan kelembagaan (UPTD. Rumah Promosi dan Kemasan)			1	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	350.000.000	4
	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang			1	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	350.000.000	4

		Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer											
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Disperindag)		80	75	240.000.000	76	260.000.000	77	290.000.000	78	300.000.000	78
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					265.000.000		285.000.000		320.000.000		330.000.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			17	265.000.000	17	285.000.000	18	320.000.000	17	330.000.000	69
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10	200.000.000	10	220.000.000	11	240.000.000	10	250.000.000	41
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11	65.000.000	11	65.000.000	11	80.000.000	11	80.000.000	44
		Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (DISPERINDAG)		80	60	20.619.715.000	60	19.466.265.000	60	19.495.345.000	60	19.558.208.000	60
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					15.635.215.000		15.637.215.000		15.639.215.000		15.641.215.000	
		Jumlah Dokumen Keuangan PD			78	15.598.215.000	78	15.598.215.000	78	15.598.215.000	78	15.598.215.000	312
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			2800	15.598.215.000	2800	15.598.215.000	2800	15.598.215.000	2800	15.598.215.000	11200
		Jumlah Laporan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	8
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	16
		Jumlah Laporan Keuangan PD			38	33.000.000	38	35.000.000	38	37.000.000	38	39.000.000	152
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			38	33.000.000	38	35.000.000	38	37.000.000	38	39.000.000	152
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					-		-		-		-	
		Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang terinventarisasi			12	-	12	-	12	-	12	-	48

	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			3	-	3	-	3	-	3	-	12
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			22	-	22	-	22	-	22	-	88
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2	-	2	-	2	-	2	-	8
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			2	-	2	-	2	-	2	-	8
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			2	-	2	-	2	-	2	-	8
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian PD			12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	48
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			22	-	23	-	23	-	23	-	91
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1	-	1	-	1	-	1	-	4
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	40
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					870.000.000		942.000.000		1.016.200.000		1.092.820.000	
		Jumlah Laporan administrasi Umum PD			12	870.000.000	12	942.000.000	12	1.016.200.000	12	1.092.820.000	48
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4	15.000.000	4	16.500.000	4	18.150.000	4	19.965.000	16
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4	75.000.000	4	82.500.000	4	90.750.000	4	99.825.000	16
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			4	20.000.000	4	22.000.000	4	24.200.000	4	26.620.000	16
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4	10.000.000	4	11.000.000	4	12.100.000	4	13.310.000	16
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4	50.000.000	4	55.000.000	4	60.500.000	4	66.550.000	16

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	4
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12	650.000.000	12	700.000.000	12	750.000.000	12	800.000.000	48
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			24	-	24	-	24	-	24	-	96
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0	-	0	-	0	-	0	-	0
		Jumlah Laporan Layanan Informasi dan Kehumasan PD			12		12		12		12		48
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.084.000.000		128.250.000		-		-	
		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Disperindag			12	1.084.000.000	12	128.250.000	12	-	12	-	48
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1	500.000.000	0	-	0	-	0	-	1
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1	30.000.000	1	20.000.000	0	-	0	-	2
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			22	554.000.000	5	108.250.000	0	-	0	-	27
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.238.500.000		2.255.000.000		2.273.150.000		2.293.115.000	
		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12	2.238.500.000	12	2.255.000.000	12	2.273.150.000	12	2.293.115.000	48
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.100.000	12	13.310.000	48
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	150.000.000	12	165.000.000	12	181.500.000	12	199.650.000	48
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2	5.000.000	2	5.500.000	2	6.050.000	2	6.655.000	8

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	2.073.500.000	12	2.073.500.000	12	2.073.500.000	12	2.073.500.000	48
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					642.000.000		353.800.000		416.780.000		381.058.000	
		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12	642.000.000	12	353.800.000	12	416.780.000	12	381.058.000	48
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			1	38.000.000	1	41.800.000	1	45.980.000	1	50.578.000	4
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4	80.000.000	4	88.000.000	4	96.800.000	4	106.480.000	16
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			40	24.000.000	40	24.000.000	40	24.000.000	40	24.000.000	160
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	300.000.000	0	-	1	50.000.000	0	-	2
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BPSMB)	Survey Kepuasan Pelayanan Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (UPTD BPSMB)	80	77	523.500.000	77	580.500.000	77	591.050.000	77	625.155.000	77	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					-		-		-		-	
		Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang terinventarisasi UPTD BPSMB			12	-	12	-	12	-	12	-	48
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1	-	1	-	1	-	1	-	4
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1	-	1	-	1	-	1	-	4

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-		-		-		-	
		Jumlah Laporan Keuangan UPTD BPSMB		12	-	12	-	12	-	12	-	48
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	-	1	-	1	-	1	-	4
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12	-	12	-	12	-	12	-	48
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000	
		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian UPTD BPSMB		12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000	48
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1	-	1	-	1	-	1	-	4
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		7	30.000.000	7	35.000.000	7	40.000.000	7	45.000.000	28
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				143.000.000		181.500.000		169.050.000		181.155.000	
		Jumlah Laporan Administrasi Umum UPTD BPSMB		12	143.000.000	12	181.500.000	12	169.050.000	12	181.155.000	48
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	4
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	4
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	2.000.000	1	25.000.000	1	2.800.000	1	3.000.000	4
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	4.000.000	1	3.000.000	1	3.200.000	1	3.500.000	4
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1	12.000.000	1	15.000.000	1	17.000.000	1	20.000.000	4
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1	10.000.000	1	17.000.000	1	18.000.000	1	20.000.000	4

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1	100.000.000	1	105.000.000	1	110.000.000	1	115.000.000	4
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	
		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD BPSMB			12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	48
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	10
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0	-	0	-	0	-	0	-	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0	-	0	-	0	-	0	-	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					141.500.000		150.000.000		163.000.000		175.000.000	
		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD BPSMB			12	141.500.000	12	150.000.000	12	163.000.000	12	175.000.000	48
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1	21.500.000	1	20.000.000	1	23.000.000	1	25.000.000	4
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	4
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0	-	0	-	0	-	0	-	0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					174.000.000		179.000.000		184.000.000		189.000.000	
		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD BPSMB			12	174.000.000	12	179.000.000	12	184.000.000	12	189.000.000	48
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			0	-	0	-	0	-	0	-	0

	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			3	40.000.000	3	45.000.000	3	50.000.000	3	55.000.000	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10	9.000.000	10	9.000.000	10	9.000.000	10	9.000.000	40
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	4
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	24
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (RPK)	Survey Kepuasan Pelayanan Teknis Rumah Promosi dan Kemasan (UPTD RPK)		80	77	4.218.800.000	77	1.898.640.000	77	1.166.314.000	77	1.511.555.400	77
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					2.000.000		2.200.000		2.420.000		2.662.000	
		Jumlah laporan Barang milik daerah yang terinventarisasi UPTD RPK			12	2.000.000	12	2.200.000	12	2.420.000	12	2.662.000	48
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			2	1.000.000	2	1.100.000	2	1.210.000	2	1.331.000	8
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12	1.000.000	12	1.100.000	12	1.210.000	12	1.331.000	48
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					58.000.000		63.800.000		70.180.000		77.198.000	
		Jumlah Laporan Keuangan UPTD RPK			12	58.000.000	12	63.800.000	12	70.180.000	12	77.198.000	48
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2	1.000.000	2	1.100.000	2	1.210.000	2	1.331.000	8
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12	57.000.000	12	62.700.000	12	68.970.000	12	75.867.000	48

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				58.000.000		67.600.000		77.210.000		86.831.000	
		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian UPTD RPK		12	58.000.000	12	67.600.000	12	77.210.000	12	86.831.000	48
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12	1.000.000	12	1.100.000	12	1.210.000	12	1.331.000	48
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		6	57.000.000	7	66.500.000	8	76.000.000	9	85.500.000	30
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				398.800.000		437.640.000		480.364.000		527.360.400	
		Jumlah Laporan Administrasi Umum UPTD RPK		12	398.800.000	12	437.640.000	12	480.364.000	12	527.360.400	48
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4	3.900.000	4	4.290.000	4	4.719.000	4	5.190.900	16
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	28.600.000	4	31.460.000	4	34.606.000	4	38.066.600	16
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4	10.400.000	4	11.440.000	4	12.584.000	4	13.842.400	16
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4	10.400.000	4	10.400.000	4	10.400.000	4	10.400.000	16
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4	16.900.000	4	18.590.000	4	20.449.000	4	22.493.900	16
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		2	7.800.000	2	8.580.000	2	9.438.000	2	10.381.800	8
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2	320.800.000	2	352.880.000	2	388.168.000	2	426.984.800	8
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.605.000.000		1.152.500.000		235.250.000		494.525.000	
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah enunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD RPK		12	3.605.000.000	12	1.152.500.000	12	235.250.000	12	494.525.000	48
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0	-	1	800.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	5
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan		0	-	1	5.000.000	0	-	1	5.000.000	2

	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0	-	2	20.000.000	0	-	2	20.000.000	4
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2	80.000.000	6	100.000.000	7	125.000.000	4	156.250.000	19
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	1	33.275.000	4
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1	3.500.000.000	0	-	0	-	0	-	1
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0	-	1	200.000.000	0	-	1	200.000.000	2
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					87.000.000		153.900.000		154.890.000		155.979.000	
		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD RPK			12	87.000.000	12	153.900.000	12	154.890.000	12	155.979.000	48
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2	4.000.000	2	4.400.000	2	4.840.000	2	5.324.000	8
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	78.000.000	12	144.000.000	12	144.000.000	12	144.000.000	48
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2	5.000.000	2	5.500.000	2	6.050.000	2	6.655.000	8
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					10.000.000		21.000.000		146.000.000		167.000.000	
		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD RPK			12	10.000.000	12	21.000.000	12	146.000.000	12	167.000.000	48
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			0	-	0	-	0	-	0	-	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			0	-	1	10.000.000	3	15.000.000	5	20.000.000	9

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya			0	-	1	1.000.000	1	1.000.000	2	2.000.000	4
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			0	-	0	-	0	-	5	5.000.000	5
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	40
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0	-	0	-	1	100.000.000	1	110.000.000	2
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0	-	0	-	1	20.000.000	1	20.000.000	2

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Tujuan sasaran strategi dan arah kebijakan

Indikator kinerja daerah adalah alat ukur spesifik untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD 2023 -2026 dapat dicapai.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan Meningkatnya ekonomi daerah Pertumbuhan PDRB dalam RPD 2023-2026 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dengan sasaran Meningkatnya pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha melalui sasaran strategis Meningkatkan Pertumbuhan Industri Pengolahan dan Perdagangan sebagaimana ditampilkan dalam tabel VII.1 berikut:

Tabel 7.1.1 Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026

No	TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN RPD	INDIKATOR KINERJA PERINDAG	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD
					RPD	2023	2024	2025	2026	RPD
	Meningkatnya ekonomi Daerah		Pertumbuhan PDRB		5,05	4,28	4,39	4,46	4,78	5,78
		Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan		-5,64	1,86	3,25	4,50	4,55	4,55
				Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	2,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,00
				Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Triliyun Rp)	14,500	15,250	16,000	16,750	17,500	17,500
		Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan		-4,62	6,50	4,94	5,50	5,55	5,55
				Presentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan	2,00	2,50	2,75	3,00	3,25	3,25
				Nilai Lapangan Usaha Perdagangan (Triliyun Rp)	11,750	12,250	12,900	13,550	14,200	14,200
	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.		Indeks Reformasi Birokrasi		66,08	68,25	69,00	69,75	70,50	70,51
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi		66,08	68,25	69,00	69,75	70,50	70,51
				Predikat RB Perangkat Daerah		67	67	67	67	67
				Nilai RB Perangkat Daerah		67	67	67	67	67

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 disusun dengan tujuan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam strategi dan arah kebijakan RPD 2023-2026 secara efektif dan efisien.

Dokumen Renstra-PD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Renstra-PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026 merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026 yang disusun melalui berbagai tahapan: persiapan, penyusunan rancangan, akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi Rancangan Akhir Renstra PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan sasaran dan indikator Perangkat Daerah untuk pencapaian Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dan menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

Demikianlah Renstra-PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Lampiran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renstra

- ✓ Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja DINAS
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Provinsi Bangka Belitung
- ✓ SK TIM RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2023-20276



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang 33148

Telp : 0717 – 439 093

Web : <http://perindag.babelprov.go.id>

Fax : 0717 – 439 093

email : perindag@babelprov.go.id